

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Cirebon telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang perlu diatasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penelitian tentang implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Cirebon menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini telah di terapkan sepenuhnya sebagai SOP dalam menangani dan menyelesaikan kasus pertanahan di Kota Cirebon. upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi peraturan, seperti meningkatkan koordinasi yang lebih baik dengan instansi lain terkait dan melakukan upaya-upaya se-transparan serta seluas mungkin dalam pelayanan terhadap masyarakat melalui media digital. Dalam keseluruhan, implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 di Kantor Pertanahan Kota Cirebon telah menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan di Kota Cirebon. Dengan komitmen dan upaya yang terus-menerus, diharapkan bahwa implementasi peraturan ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pembangunan di Kota Cirebon.
- b. Adapun kendala yang muncul dari kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak dan

kewajiban mereka terkait dengan tanah. Untuk mengatasi kendala atau masalah tersebut kantor Pertanahan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas berikut saran yang berkenaan dengan Penelitian ini diantara-Nya yaitu:

- a. Ditengah kemajuan teknologi yang semakin canggih, memanglah kantor pertanahan sudah membuat program atau sosialisasi berbasis digital, tetapi yang menjadi kendala ialah kurang responsif nya kantor pertanahan dalam merespon aduan atau keluhan secara daring. Karena sudah tentu pihak-pihak yang memiliki suatu pertanyaan dan perlu konfirmasi dari kantor Pertanahan, tidak selalu bertempat tinggal berdekatan dengan kantor Pertanahan. Dengan efektifnya pelayanan secara daring ini sudah tentu dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat kota Cirebon maka dari keresahan tersebut diharapkan kantor pertanahan bisa meningkatkan responsifitas pelayanan lewat media-media digital tersebut.
- b. Selain dari dari segi responsifitas yang dirasa masih lambat. Disarankan kantor pertanahan mengadakan kembali pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) karena mengingat implikasinya yang sangat signifikan bagi masyarakat luas dan kunci dari suksesnya program ini melalui koordinasi dengan institusi-institusi terkait. PTSL memiliki beberapa tujuan, yaitu meningkatkan kepastian hukum atas tanah dengan mendaftarkan seluruh bidang tanah secara sistematis dan lengkap, mengurangi sengketa pertanahan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban mereka terkait dengan tanah, serta meningkatkan pelayanan pertanahan dengan menyediakan informasi yang akurat dan transparan tentang status kepemilikan tanah.